

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Kajian yang telah ada sebelumnya, antara lain:

1. Menurut Izumi dkk. menyimpulkan bahwa inovasi tidak harus sepenuhnya produk baru atau berbasis teknologi tinggi, tetapi pendekatan dan kerangka kerja dapat menghasilkan perubahan dan memengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang. Penting untuk mempertimbangkan baik produk inovatif maupun pendekatan dalam strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) saat bekerja untuk mengembangkannya lebih lanjut dan membuatnya lebih efektif dan berguna (Izumi dkk, 2019).
2. Sakurai dkk. meninjau terkait penggunaan teknologi informasi dalam situasi bencana. Dari perspektif pemerintah daerah, peran penting dari sistem informasi, yaitu pencatatan, pertukaran dan pemrosesan informasi, sangat krusial dalam manajemen bencana yang efektif. Pencatatan dan pertukaran informasi adalah fungsi awal dari sistem informasi sebelum bencana terjadi, sedangkan pemrosesan dan pertukaran informasi menjadi inti dalam operasi bantuan bencana (Sakurai dkk, 2019).
3. Pahleviannur, dalam penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan. Prioritas dalam mengurangi risiko bencana harus diintegrasikan ke dalam sektor pendidikan dengan tujuan menciptakan generasi yang tahan terhadap bencana. Pemahaman mengenai bencana dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan mengurangi risiko bencana di suatu wilayah (Pahleviannur, 2019).
4. Atmojo, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan mitigasi bencana sejak dini bagi masyarakat dan anak-anak usia dini adalah hal yang paling penting. Dengan demikian, ketika terjadi bencana, masyarakat dan anak-anak sudah memiliki pemahaman awal tentang langkah-langkah penyelamatan diri (Atmojo, 2020).

5. Hamida dan Widyasamratri, dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa upaya mitigasi tidak harus dilakukan di seluruh wilayah, karena tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam satu wilayah yang terancam bencana mungkin berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara rinci, termasuk identifikasi risiko di setiap kepala keluarga (Hamida dkk, 2019).

Kebaharuan: gagasan dalam wujud inovasi program yang memiliki fokus untuk memaparkan terkait strategi berupa solusi penanggulangan bencana yang dapat disesuaikan dengan karakteristik tahapan siklus terjadinya bencana, melalui program “*Disaster Emergency Starter Pack (DISESPACK)* : Program Menciptakan Masyarakat Tanggap Bencana” yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi program ini dapat dijadikan sebagai pedoman mitigasi bencana kepada masyarakat yang dapat dicantumkan dalam skema peringatan dini pada situasi darurat bencana. Dengan demikian, inovasi ini juga dapat diusulkan pada lembaga penanganan bencana seperti BNPB dan BPBD untuk dapat digunakan sebagai sebuah desain kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bidang kebencanaan.

B. Kajian Teori

Bencana atau yang dalam bahasa Inggris dipahami sebagai *disaster* menurut WHO (*World Health Organization*) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan/pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari masyarakat luar wilayah terdampak (Sabir & Phil, 2016). Bencana adalah situasi dan kondisi mengancam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tergantung pada cakupannya, bencana ini bisa merubah pola kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, menghilangkan harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat, serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar. Negara Indonesia juga termasuk negara yang sangat rentan terhadap bencana, terutama gempa bumi (Abott, 2004). Dalam menanggulangi masalah kerawanan bencana, maka

Perencanaan Penanggulangan Bencana melalui pendekatan Manajemen Risiko menjadi aspek yang sangat penting. Inisiatif dan komitmen pemerintah terkait pengelolaan risiko bencana harus dimulai dengan mengajak seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penanggung jawab dan *leading* sektor penanggulangan bencana wajib melakukan beberapa inisiatif strategis untuk menjamin terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang handal. Beberapa inisiatif strategis tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan; 1) Penyusunan regulasi yang kuat khususnya terkait penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. 2) Peningkatan komitmen *stakeholders*. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk merangkul, memberdayakan serta meningkatkan peran serta seluruh pelaku utama dalam penanggulangan bencana mulai dari pemerintah, masyarakat (*civil society*) serta dunia usaha (Ahdi, 2015).

Menurut Suhardjo, tahap pelaksanaan strategi berupa solusi penanggulangan bencana dapat disesuaikan dengan karakteristik tahapan siklus terjadinya bencana, antara lain : (1) Saat bencana, yakni ketika padat aktivitas dalam suasana darurat, (2) Pasca bencana, yakni mereduksi komplikasi masalah yang rumit dalam rekontruksi dan rehabilitasi, (3) Pra bencana, dimana perlu perencanaan yang menyeluruh. Sebab, masyarakat yang terancam bencana bersifat sangat majemuk. Bagi yang telah terdidik maupun yang masih belum tersentuh pendidikan formal, tetap perlu memahami akan pentingnya Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Cara yang paling strategis untuk mengimplementasikan pendidikan PRB ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun informal (Suhardjo, 2015).